

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Yth. (Daftar terlampir)

### SURAT EDARAN Nomor SE-22 /PB/2018

#### **TENTANG**

BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2018

#### A. Umum

Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2018 dan sehubungan dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.1.KU.02.02-120 tanggal 14 Februari 2018 perihal Usulan Pencairan Penggunaan Penerimaan Tahun 2018 PNBP Pelayanan Jasa Hukum Tahap II, diperlukan petunjuk lebih lanjut mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBP pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2018.

# B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## C. Ruang Lingkup

- 1. Penetapan Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Mekanisme pencairan Dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### D. Dasar

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 723/KMK.02/2016 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-7/PB/2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap I Tahun Anggaran 2018.
- Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2382/PB/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Persetujuan Penundaan Terhadap Perhitungan Sisa Maksimum Pencairan (MP) PNBP Tahun Anggaran Sebelumnya Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA. 2018.

## E. Ketentuan Pencairan Dana

Ketentuan pencairan dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

- Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sampai dengan Tahap II Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 113.602.962.806,-(Seratus tiga belas miliar enam ratus dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam rupiah).
- 2. Perhitungan Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tahun anggaran 2018 pada angka 1 diatas terdiri atas :
  - a. Rp 56.432.318.625,- (lima puluh enam miliar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) berdasarkan sisa Maksimum Pencairan dana PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tahun anggaran sebelumnya. Sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tahun anggaran sebelumnya dimaksud akan diperhitungkan dengan PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tahun anggaran berjalan.
  - b. Rp 57.170.644.181,- (lima puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah) berdasarkan PNBP tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara sampai dengan bulan Januari 2018.
- 3. Berdasarkan pagu maksimum pencairan dana tersebut pada angka 1, maka batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahap II Tahun Anggaran 2018 masing-masing Satuan Kerja adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
- 4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam proses penerbitan SP2D untuk pencairan DIPA PNBP berkenaan, tidak perlu meminta bukti setor (SSBP lembar ke-4) kepada Satker bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan.

## Penutup

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2018

DIREKTURJENDERAL

MARY/ANTO HARJOWIRYONG NIP 19590606 198312 1 001

### Tembusan:

1. Menteri Keuangan

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM

4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

5. Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan

6. Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan

7. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

8. Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

9. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

### DAFTAR KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

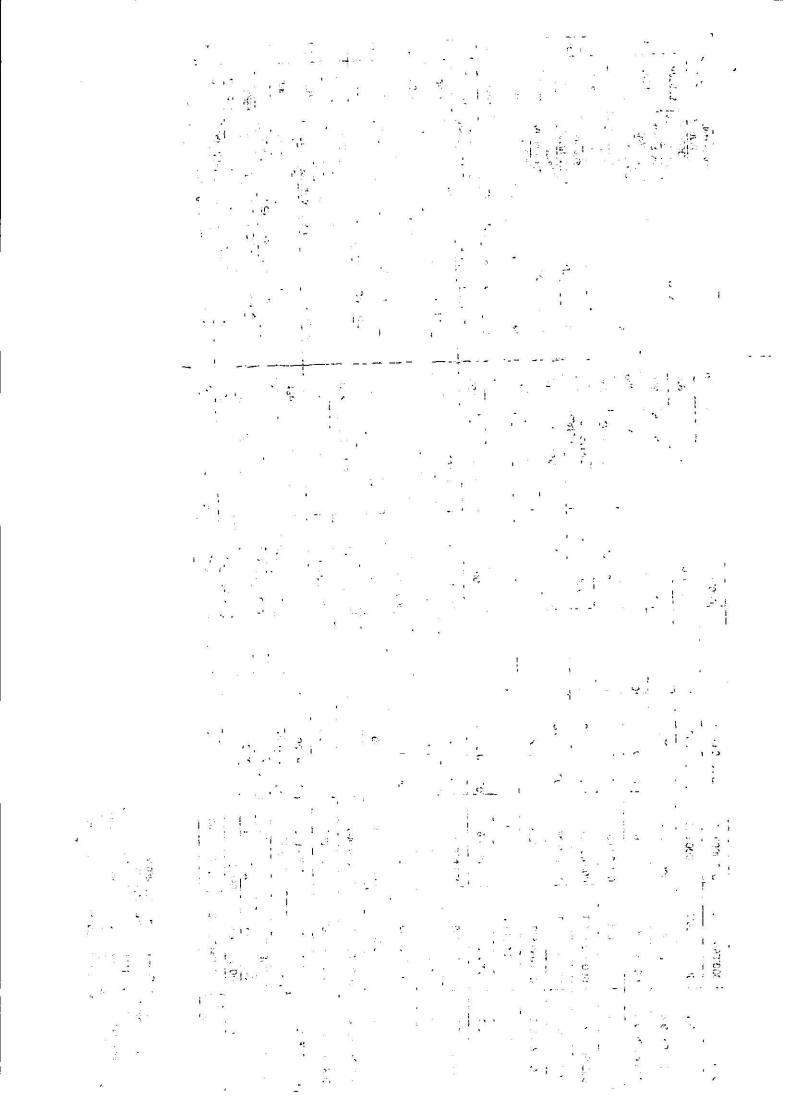
- 1. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V
- 2. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG I
- 3. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I
- 4. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA
- 5. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA II
- 6. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH
- 7. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I
- 8. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG
- 9. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKANBARU
- 10. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PINANG
- 11. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAMBI
- 12. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALEMBANG
- 13. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG
- 14. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PONTIANAK
- 15. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALANGKARAYA
- 16. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARMASIN
- 17. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA
- 18. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANADO
- 19. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALU
- 20. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASSAR II
- 21. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI
- 22. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON
- 23. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DENPASAR
- 24. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM
- 25. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUPANG
- 26. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAYAPURA
- 27. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU
- 28. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TERNATE
- 29. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERANG
- 30. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKAL PINANG
- 31. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO
- 32. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANOKWARI
- 33. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAMUJU

W

#### Lampiran :

Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE- 23 /PB/2018 tanggal 21 Maret 2018 tenteng Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap II Tahun Anggaran 2018

No	Kode		- Wada		<u> </u>		ļ			
1	Satker 099297	Satuan Kerja/Instansi Pengguna	Kode KPPN	KPPN Pembayar	Pagu PNBP	Blokir	Pagu Setelah Blokir	MP Tahap I	MP Taháp (I	MP Sampai
2	099298	BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA	139	JAKARTA V	1,925,037,000	0		288.755.550		dengan Tahap II.
3	099299	BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG	026	SEMARANG I	3.756,655,000	0	1,020,001,000		438.026.000	726.781.550
-		BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA	135	SURABAYA II	2.598.259.000			563.498.250	945.852.000	1.509.350.250
4	099300	BALAI HARTA PENINGALAN MEDAN	004	MEDANI	1.413,901,000		2,000,200,000	389.738.850	705.230.000	1.094.968.850
5	408432	BALAI HARTA PENINGGALAN UJUNG PANDANG	136	MAKASSAR II	1.624.615.000		1.413.901.000 1.624.615.000	212.085.150 243.692.250	517.419.360	729.504.510
6	408721	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	139	JAKARTA V	6.000.000.000		6.000,000,000		286.045.000	529.737.250
7	408730	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	022	BANDUNG I	6.000,000,000			503.368.654	2.992.347.985	3.495.716.639
8	408743	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	026	SEMARANG I			6,000,000,000	900.000.000	2.274.290.000	3.174.290.000
9	408753	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	135	SURABAYA II	6.000.000.000	0	6.000,000,000	900.000.000	1.775.479.000	2.675.479.000
10	408762	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM			6.000.000.000	0	6,000,000,000	900.000.000	4.057.875.000	4.957.875.000
11	408772	SUMATERA UTARA DI MEDAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	PROPERTY.	MEDANI	6.000.000.000	0	6.000,000.000	600.000.000	1.906.983.000	2.506.983.000
12	408783	UJUNG PANDANG KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	136	MAKASSAR II	4.000.000.000	0	4.000.000.000	464.834.000	891.671.000	1.356.505.000
		BANDA ACEH KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	001	BANDA ACEH	2.600.000.000	0	2.600.000.000	390.000.000	1.530.846.000	1.920.846.000
13	408792	PADANG	010	PADANG	4.000.000.000	0	4.000,000.000	600.000.000	2.336.325.000	2.936.325.000
14	408803	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	008	PEKANBARU	3.621.100.000	0	3.621.100.000	543,165,000	1.165,550,000	1.708.715.000
15	408812	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALEMBANG	014	PALEMBANG	2.600,000,000	. 0	2.600.000.000	390.000.000	1.332.725.000	
16	408822	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	617/ 1	BANDAR LAMPUNG	3.861.000,000	0	3.861,000,000			1.722.725.000
17	408833	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	333	PONTIANAK	2.600.000,000			579.150.000	1.695.709,000	2.274.859.000
18	400042	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAW BANJARMASIN	2	BANJARWASIN		- 0	2.600.000.000	390.000.000	1.120.437.000	1.510.437.000
19	408852	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	00 1000		2.536.000.000	0	2.536.000.000	380.400,000	1.648.079.000	2.028.479.000
20	108863	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM		SAMARINDA	4.000.000.000	0	4.000,000.000	600.000.000	2.076.992.000	2.676.992.000
		MANADO KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM		MANADO	2.600.000,000	٥	2.600.000.000	390.000.000	1.053.545.000	1.443.545.000
<u>-   [                                  </u>	100013	DENPASAR	037	DENPASAR	3.800.000.000	0	3.800.000.000	570.000.000	1.288.653.000	1.858.653.000



No	Kode Satker	Satuan Kerja/Instansi Pengguna	Kode	KPPN Pembayar	Pagu PNBP	Blokir	Pagu Setelah	MP Tahap I	****	MP Sampai
22	408882	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	039	KUPANG	2.434.607.000		Blokir		MP Tahap II	dengan Tahap I
23	408893	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	061	AMBON		·	2.434.607.000	365.191.050	742.200.000	1.107.391.05
24	408902	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM		AMBUN	2.600.000.000	(	2.600.000.000	390.000.000	1.321.273.000	1.711.273.000
24	400902	JAYAPURA	063	JAYAPURA	2.600.000.000	0	2.600,000,000	350.401.000	639.501.000	989.902.000
25	409160	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	012	JAMBI	2.430.000.000	0				
26	409170	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	016	BENGKULU	2.360.000,000		2.430.000.000	364.500.000	1.735.719.000	2.100.219.000
27	409180	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	030			0	2.360.000.000	354.000.000	1.451.542.000	1.805.542.000
28	409191	YOGYAKARTA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	030	YOGYAKARTA	3.745.000.000	0	3.745.000.000	561.750.000	1.799.585.000	2.361.335.000
-		PALANGKARAYA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	043	PALANGKARAYA	2.600.000.000	0	2.600.000.000	390.000.000	851.083.000	1.241.083.000
29	409200	KENDARI	060	KENDARI	2.440.000.000	0	2.440.000.000	366.000.000	1.519.257.000	
30	409211	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	051	PALU	2.520.000.000	0	2.520.000.000			1.885.257.000
31	409220	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	038	MATARAM	2.600.000.000	-		378.000.000	922.062.000	1.300.062.000
32	409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI	139			0	2.600.000.000	390.000.000	855.491.000	1.245.491.000
33	648990	HUKUM UMUM KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM		JAKARTA V	501.372.104.000	1.649.388.000	499.722.716.000	38.460.932.621	2.983.182.836	41.444.115.457
+		PROPINSI BANTEN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM		SERANG	6.000.000.000	0	6.000.000.000	900.000.000	2.869.694.000	3.769.694.000
4	649002	PROPINSI BANGKA BELITUNG		PANGKAL PINANG	4.000.000.000	0	4.000.000.000	254.634.000		
5	649011	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	050	GORONTALO	2.600.000.000	0			801.024.000	1.055.658.000
6	649023	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	062	TERNATE			2.600.000.000	390.000.000	1.488.239.000	1.878.239.000
7	667773	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM			2.600.000.000	0	2.600.000.000	390.000.000	1.203.521.000	1.593.521.000
8		DAN HAM PAPUA BARAT KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM		MANOKWARI	2.441.025.000	0	2.441.025.000	366.153.750	823.904.000	1.190.057.750
-	W77102	DAN HAM KEPULAUAN KIAU KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	URIM :	TANJUNG PINANG	3.813.790.000	C	3.813.790.000	572.068.500	2.196.691.000	2.768.759.500
9	667793	DAN HAM SULAWESI BARAT	178	ULUMAN	2.600.000.000	0	2.600.000.000			
		TOTAL			629.293.093.000	1.649.388.000		390.000.000	926.596.000	1.316.596.000
					1.043.300.000	627.643.705,000	56.432.318.625	57.170.644.181	113.602.962.806	

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
JENDERAL JENDERAL PERBENDAH